

## PENGEMBANGAN SMK MODEL UNTUK MASA DEPAN

Slamet PH

FT Universitas Negeri Yogyakarta

email: slametph@yahoo.com

**Abstrak:** Praktik penyelenggaraan SMK di Indonesia saat ini menunjukkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut: menyelenggarakan fungsi tunggal, yaitu menyiapkan siswa untuk bekerja, untuk menjadi karyawan, dan kurang menyiapkan untuk menjadi wirausahawan, kurang cepat tanggap terhadap tuntutan-tuntutan pembangunan ekonomi, lemah keselarasannya dengan dunia kerja, dan tidak ada jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap SMK sangat banyak, tetapi beberapa hal berikut harus segera ditanggapi, yaitu rencana pembangunan jangka panjang nasional, cetak biru insan Indonesia cerdas dan kompetitif 2025, *master plan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, keanekaragaman kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tuntutan globalisasi. Agar SMK dapat memainkan peran lebih penting dalam pembangunan ekonomi, SMK harus memperluas fungsinya dari fungsi tunggal menjadi SMK Model yang menyelenggarakan fungsi majemuk yang selaras dengan kemajemukan kebutuhan masyarakat. Transisi dari SMK fungsi tunggal menjadi SMK Model (fungsi majemuk) memerlukan restrukturisasi dalam kebijakan, perencanaan, penganggaran, kelembagaan, dan sumber daya.

**Kata Kunci :** *kelemahan SMK, tekanan dan faktor yang berpengaruh terhadap SMK, fungsi tunggal, SMK Model, fungsi majemuk*

### DEVELOPING VOCATIONAL SCHOOL MODEL FOR THE FUTURE

**Abstract:** The current practices of vocational schools in Indonesia mostly show the following weaknesses: offering single function of preparing students for gainful employment, preparing students to become employees and lack of entrepreneurship preparation, slow response to economic development, weak link and match with the world of work, and no guarantee for graduates to get decent work. The external forces and factors influencing vocational schools are numerous but the followings must be urgently responded: national long range development plan, blue print for national education long range development plan, master plan for accelerating and enlarging national economic development of Indonesia, diversity of society needs particularly the world of work, technological development, and globalization. In order vocational schools to be able to play more important roles in Indonesian economic development, they have to enlarge their functions from solely single function to vocational school model having multiple functions of serving diverse needs of society. The transition from single function to multiple functions requires restructuring policy, planning, budgeting, institutions, and resources required to run vocational school model.

**Keywords :** *vocational school weaknesses, vocational school challenges, vocational school model, single function, and multi-functions*

### PENDAHULUAN

Dua permasalahan yang awet dan krusial dalam pendidikan kejuruan dari waktu ke waktu adalah tujuan yang akan dicapai dan upaya-upaya untuk mencapainya (catatan: penggunaan istilah pendidikan kejuruan dan sekolah menengah kejuruan/SMK akan digunakan silih berganti). Pendidikan kejuruan diharapkan selalu selaras secara simbiosis dengan kebutuhan

dunia kerja, namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian karena keduanya memiliki dinamika kepentingan yang tidak selalu sama; keduanya juga memiliki pelaku yang hasrat, harkat, dan martabatnya mengalami pasang surut; keduanya juga memiliki sistem yang tidak selalu kompatibel satu dengan lainnya; dan keduanya juga memiliki kultur yang tidak mudah disatukan. Oleh karena itu, merumuskan

tujuan pendidikan kejuruan dan memilih upaya-upaya yang tepat untuk mencapainya agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja merupakan pekerjaan dinamis bagi pembuat dan pelaksana kebijakan.

Secara umum, tujuan pendidikan kejuruan saat ini cenderung fokus pada fungsi tunggal yaitu menyiapkan siswanya untuk bekerja pada bidang tertentu sebagai pekerja/karyawan. Tujuan ini tidak salah, namun keanekaragaman kebutuhan masyarakat menuntut SMK menjalankan fungsi majemuk. Jika fungsi majemuk yang dipilih, maka upaya-upaya yang perlu ditempuh untuk mencapainya harus juga majemuk. SMK Model merupakan terobosan baru yang dirancang untuk hal tersebut. Sisa tulisan ini berturut-turut akan memaparkan kondisi SMK saat ini, tuntutan eksternal, SMK Model sebagai terobosan baru, fungsi majemuk SMK Model, dan diakhiri dengan penutup.

### KONDISI SMK SAAT INI

Secara umum, kondisi SMK saat ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) hanya menyelenggarakan fungsi tunggal yaitu menyiapkan siswanya untuk bekerja pada bidang tertentu sebagai karyawan; (2) lemah dalam menyiapkan siswanya untuk menjadi wirausahawan; (3) lambat daya tanggapnya terhadap dinamika tuntutan pembangunan ekonomi; (4) belum optimal keselarasannya dengan dunia kerja; dan (5) belum ada kepastian jaminan terhadap siswanya untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Lima kondisi SMK tersebut diuraikan seperlunya sebagai berikut.

**Pertama**, sebagian besar SMK saat ini hanya menyelenggarakan fungsi tunggal, yaitu menyiapkan lulusannya untuk bekerja. Fungsi-fungsi lain yang juga tidak kalah penting belum dilaksanakan secara maksimal, misalnya pelatihan bagi penganggur, pelatihan bagi karyawan perusahaan, pengembangan unit produksi/*teaching factory*, industri masuk SMK/*teaching industry*, lembaga sertifikasi profesi (LSP), tempat uji kompetensi (TUK), dan pengembangan bahan pelatihan. Akibatnya, sumber daya SMK terutama guru dan fasilitas sekolah

belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga terjadi *idle capacity/under utilization*.

**Kedua**, kebanyakan SMK saat ini menyiapkan siswanya hanya untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu sebagai pekerja/karyawan/pegawai. Sangat sedikit sekali SMK yang sengaja menyiapkan siswanya untuk menjadi wirausahawan (pengusaha). Padahal, menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010), lulusan SMK yang diterima sebagai karyawan di sektor formal hanya 30% dan yang 70% bekerja di sektor informal (usaha mikro/kecil) yang tidak pernah dipersiapkan dengan baik oleh SMK. Oleh karena itu, SMK harus menyiapkan siswanya untuk menjadi karyawan dan wirausahawan/pengusaha.

**Ketiga**, SMK kurang cepat tanggap terhadap tuntutan-tuntutan pembangunan ekonomi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Potensi ekonomi lokal, kekayaan sumber daya natural dan kultural, dan persaingan regional dan global belum ditanggapi secara cepat, cekat, dan tepat. Jika demikian, peran SMK terhadap pembangunan ekonomi tidak akan optimal.

**Keempat**, keselarasan antara dunia SMK dan dunia kerja dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, dan waktu, belum terorganisir secara formal. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, tetapi wadah formal yang menjembatani dunia SMK dan dunia kerja belum ada. Di masa lalu (1994) ada wadah yang menjembatani dunia SMK dan dunia kerja yaitu Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN). MPKN dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan dengan Nomor 0217/U/1994 dan 044/SKEP/KU/VIII/94, tetapi sekarang Lembaga ini tidak aktif. Padahal Surat Keputusan Bersama tersebut juga belum dicabut.

**Kelima**, pembalikan proporsi peserta didik SMA:SMK dari 70%:30% menjadi 30%:70% menuntut penyelenggaraan SMK yang mampu menjamin siswanya untuk

memperoleh pekerjaan yang layak. Penjaminan terhadap siswanya untuk memperoleh pekerjaan yang layak merupakan tugas tidak mudah karena melibatkan banyak pihak. Meskipun demikian, upaya-upaya untuk memastikan agar lulusan SMK segera memperoleh pekerjaan merupakan tugas penting SMK, baik melalui pembelajaran yang bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun melalui program-program bimbingan dan konseling kejuruan yang dirancang dengan baik.

Kondisi SMK tersebut tidak boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus karena akan membuat SMK kurang berfungsi maksimal bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Pendidikan kejuruan itu adalah pendidikan ekonomi sehingga tiga pertanyaan berikut harus dijawab dengan tepat, yaitu *what to produce, how to produce, and for whom*. Oleh karena itu, SMK harus pro-penciptaan lapangan kerja, pro-kegiatan ekonomi, pro-pertumbuhan ekonomi, pro-pemerataan ekonomi, dan pro-kesejahteraan (*pro-job, pro-activity, pro-growth, pro-distribution, dan pro-prosperity*).

### TUNTUTAN EKSTERNAL

SMK diharapkan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menanggapi tuntutan-tuntutan eksternal berikut: (1) rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN); (2) cetak biru pembangunan pendidikan nasional; (3) master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia/MP3EI; (4) keanekaragaman kebutuhan masyarakat, khususnya dunia kerja; (5) kemajuan teknologi; dan (6) tuntutan globalisasi.

### Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU 17/2007) menetapkan bahwa visi Indonesia tahun 2025 adalah: "*Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur*." Lebih jauh lagi, UU 17/2007 juga mencanangkan idaman-

idaman kemajuan pada tahun 2045 sebagai berikut, yaitu: "*Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia pada tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan*." UU 17/2007 juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 misi pembangunan nasional sebagai berikut: (1) *mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila*; (2) *mewujudkan bangsa yang berdaya-saing*; (3) *mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum*; (4) *mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu*; (5) *mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan*; (6) *mewujudkan Indonesia asri dan lestari*; (7) *mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*, dan (8) *mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional*.

Berdasarkan visi dan misi RPJPN 2025 tersebut disusunlah empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebagai berikut. (1) RPJMN 1: 2005-2009, yaitu menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. (2) RPJMN 2: 2010-2014, yaitu memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat daya saing perekonomian. (3) RPJMN 3: 2015-2019, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) RPJMN 4: 2020-2024, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan dan perluasan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (lihat Gambar 1).



Gambar 1: Pentahapan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU 17/2007)



Gambar 2: Tema Pembangunan Enam Koridor Ekonomi  
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2012

Karena pendidikan nasional merupakan salah satu sektor pembangunan nasional, maka tahapan-tahapan pembangunan nasional tersebut harus digunakan sebagai acuan bagi pembangunan pendidikan nasional.

### **Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025**

Berdasarkan empat tahapan pembangunan nasional 2005-2025 pada Gambar 1, Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemdikbud) menyusun rencana induk pembangunan pendidikan nasional yang disebut *Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025*. Cetak Biru inilah yang digunakan oleh Kemdikbud sebagai acuan penyusunan 4 tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang pendidikan sebagai berikut: (1) RPJMN 1: 2005-2010 adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi; (2) RPJMN 2: 2010-2015 adalah penguatan pelayanan; (3) RPJMN 3: 2015-2020 adalah peningkatan daya saing regional; dan (4) RPJMN 4: 2020-2024 adalah peningkatan daya saing internasional. Untuk mewujudkan idaman RPJMN 3 dan RPJMN 4, Kemdikbud harus meningkatkan mutu satuan-satuan pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sampai perguruan tinggi agar berdaya saing regional dan internasional. Pengembangan SMK Model dirancang untuk kepentingan tersebut.

### **Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia**

Sebagai penajaman dari UU 17/2007 tentang RPJPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk periode tahun 2011-2025 dengan menempuh tiga (3) strategi utama.

**Pertama**, pengembangan potensi ekonomi daerah melalui 6 (enam) koridor ekonomi yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku. MP3EI telah membuat tema/peta perekonomian yang akan dikembangkan melalui 6

koridor ekonomi tersebut berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah. Enam (6) tema/peta koridor perekonomian yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 2.

Pemetaan 6 koridor ekonomi tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan jenis, lokasi, jumlah, kualitas, dan waktu pengembangan SMK Model.

**Kedua**, pengembangan konektivitas intra dan inter koridor dalam skala nasional dan internasional merupakan strategi utama ke 2 MP3EI dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata dengan slogan "*locally integrated and globally connected*". MP3EI telah merumuskan 3 elemen utama pengembangan konektivitas, yaitu: (1) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan keterpaduan; (2) memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui *inter-modal supply chain systems*; dan (3) menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam menyebarkan manfaat pembangunan secara luas.

**Ketiga**, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan serta teknologi di dalam koridor. Strategi utama nomor (3) menyatakan bahwa untuk mendukung ketercapaian MP3EI diperlukan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, program pendidikan profesi, pengembangan SMK, pengembangan pelatihan kerja, dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi. Demi efisiensi, program-program tersebut dapat dipadukan (diintegrasikan) dan sumber daya yang ada dapat digunakan secara bersama antar program-program tersebut (*resource sharing*). Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan SMK Model, yaitu SMK yang dikembangkan dari fungsi tunggal (menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja pada bidang tertentu) menjadi SMK yang menyelenggarakan multi-fungsi (fungsi majemuk) atas dasar prinsip-prinsip kemanfaatan, keterpaduan, *resource integration*, *resource sharing*, dan pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal.

### **Keanekaragaman Kebutuhan Masyarakat**

Sebagai Bangsa dan Negara kepulauan, Indonesia memiliki keanekaragaman jenis masyarakat yang tentu saja kebutuhannya juga beranekaragam. Ada kelompok penganggur yang ingin bekerja, ada kelompok karyawan perusahaan yang ingin meningkatkan keterampilannya, ada kelompok satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kejuruan yang membutuhkan bahan pelatihan, ada kelompok masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, dan sebagainya untuk tidak disebut satu persatu karena terlalu banyak jumlah jenisnya. Jika SMK ingin berperan besar dalam memajukan masyarakat yang beraneka ragam kebutuhannya, maka SMK harus mampu memberikan pelayanan majemuk terhadap keanekaragaman kebutuhan masyarakat. Tentu saja tidak semua keanekaragaman kebutuhan masyarakat harus dilayani oleh SMK, tetapi harus dipilah dan dipilih sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki oleh SMK. Peran majemuk SMK sangat diperlukan untuk melayani keanekaragaman kebutuhan masyarakat dan SMK Model dirancang untuk itu.

### **Kemajuan Teknologi**

Jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini mencakup teknologi konstruksi, manufaktur, transportasi, komunikasi, energi, bio, dan bahan. SMK sangat dekat hubungannya dengan teknologi karena teknologi merupakan alat utamanya. Kedekatan hubungan SMK dan teknologi bukan barang baru karena teknologi merupakan bagian dari kehidupan SMK. Teknologi yang saat ini sarat perubahan menuntut SMK memiliki daya adaptasi dan adopsi yang cepat agar mampu menyiapkan siswanya berkemampuan dan berkesanggupan untuk melekat teknologi, luwes menghadapi perubahan teknologi, dan terampil dalam mengoperasikan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan SMK ke depan harus semutakhir kemajuan teknologi.

UNESCO (1992) memprediksi bahwa perubahan teknologi akan membuat SMK melakukan *de-skilling* pendidikan kejuruan disatu sisi

dan disisi lain akan menuntut pendidikan kejuruan mengajarkan kemampuan *multi-skilling*. UNESCO juga menyarankan agar perencanaan kurikulum pendidikan kejuruan memberi prioritas pada *multi-skilling, flexibility, retrainability, entrepreneurship, credit transfer, dan continuing education*. Saran UNESCO tersebut sebenarnya telah tertampung dalam *White Paper* tentang pengembangan pendidikan kejuruan di Indonesia yang disebut *Skills Toward 2020*. Namun demikian, implementasinya mengalami distorsi dan diskontinuitas dari waktu ke waktu akibat pergantian pimpinan pendidikan kejuruan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Kemajuan teknologi menuntut SMK untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kompetensi lulusannya, kurikulumnya, proses belajar mengajarnya, penilaian prestasi belajarnya, pendidik dan tenaga kependidikannya, sarana dan prasarannya, pendanaannya, dan pengelolaannya. Disamping itu, dengan potensi teknologi yang dimiliki oleh SMK, sudah saatnya SMK melakukan perubahan fungsinya, dari fungsi tunggal yang hanya menyiapkan siswanya untuk bekerja sebagai karyawan menjadi SMK yang memiliki fungsi majemuk untuk melayani kemajemukan tuntutan masyarakat.

Khusus untuk pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan, UNESCO (1992) juga menyarankan agar pendidikan kejuruan memiliki kurikulum yang komponen-komponennya terdiri atas *broad academic base, basic training, specialized training, dan industrial upskilling* yang benar-benar mampu menyiapkan siswanya untuk bekerja dan berkembang di tempat kerjanya.

### **Tuntutan Globalisasi**

Era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen, kepemimpinan, dan sumberdaya manusia. Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan kandungan nilai tambah, memperluas keragaman produk, dan meningkatkan mutu produk. Keunggulan manajemen dan kepemimpinan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Keunggulan sumberdaya manusia (SDM) merupakan kunci daya

saing karena SDM lah yang akan menentukan siapa yang mampu menjaga kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemenangan dalam persaingan global. Sumber daya manusia berkualitas unggul memiliki sifat-sifat kreatif, inovatif, luwes, melek teknologi, terampil, dan memiliki kecerdasan majemuk. Trilling dan Fadel (2010) menyarankan agar pendidikan pada abad 21 mampu menghasilkan “*innovative, inventive, self-motivated and self-directed, creative problem solvers to confront increasingly complex global problem*”. Saran tersebut sebenarnya telah diterapkan oleh di beberapa negara yang telah menyadari sepenuhnya betapa pentingnya memiliki satuan-satuan pendidikan yang cerdas, berkualitas tinggi, dan unggul.

Negara-negara berikut telah memiliki satuan-satuan pendidikan berkualitas tinggi. Misalnya, Malaysia memiliki *Sekolah Bestari/Smart School*, Thailand memiliki *World Standard Class*, Filipina memiliki *SBM Grand* untuk sekolah umum dan untuk sekolah kejuruan namanya *Strengthened Technical and Vocational Education Program/STVEP*, Hongkong memiliki *Quality School Improvement Project*, dan Jepang memiliki *Reinbow Plan*. Negara-negara tersebut sangat proaktif dalam menyiapkan sumber daya manusia agar berkualitas tinggi dibanding dengan Indonesia yang baru saja memulai mengenalkan sekolah bertaraf internasional dan itupun dikritik mati-matian, yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Harus diakui bahwa setiap langkah inisiatif untuk kreatif dalam memajukan pendidikan tidak jarang akan menuai kritik karena ide-ide cemerlang juga sering keluar dari kemapanan yang telah lama mengakar di masyarakat.

Jika Indonesia tidak memiliki sekolah-sekolah yang mampu menyiapkan sumber daya manusia berkaliber dunia seperti negara-negara yang disebut sebelumnya, cepat atau lambat sekolah-sekolah Indonesia akan ketinggalan dengan sekolah-sekolah luar negeri. Konsekuensinya, kemampuan daya saing global Indonesia dalam sumber daya manusia akan lemah, sekolah-sekolah Indonesia akan menjadi importir ilmu dari luar negeri seperti dirasakan sekarang, dan yang lebih memprihatinkan,

berbagai kekayaan natural dan kultural telah banyak yang dikelola oleh bangsa lain karena ketidakmampuan bangsa Indonesia, yang pada gilirannya bangsa Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri.

Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi agar kekayaan alam (darat, laut, udara) yang melimpah harus dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri dan bukan oleh bangsa lain. Rendahnya mutu sumber daya manusia Indonesia telah merelakan kepada bangsa lain untuk menjadi tuan di Indonesia, untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia, baik berupa tambang emas, timah, batubara, minyak, maupun gas bumi. Hal ini jelas merugikan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus juga mampu mengelola sendiri berbagai keunggulan lokal yang ragamnya tiada bandingannya di dunia sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mengelolanya. Saat ini sejumlah keunggulan lokal telah dikelola oleh bangsa-bangsa lain karena Indonesia tidak mampu, misalnya: mutiara di Lombok di kelola oleh Jepang, pusat-pusat pembibitan tanaman pelan-pelan tetapi pasti akan dikelola oleh Jepang, kelapa sawit oleh Malaysia, ukir-ukiran oleh Malaysia dan Australia, batik oleh Malaysia, Hongkong, dan Taiwan.

Pada tahun 2008, *United Nations* mengajak negara-negara anggotanya untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang ditempuh melalui pengembangan industri kreatif, misalnya *cultural heritage, visual and performing arts, audiovisual industries, publishing and printed media, new media, design, and creative services including advertising and architecture*. Bagi Indonesia, apa yang dicontohkan oleh United Nation hanyalah sebagian kecil karena Indonesia memiliki kekayaan kultural dan natural yang jauh lebih banyak dari pada negara-negara lain. Menanggapi ajakan United Nation, Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang isi utamanya mencakup pengembangan industri-industri kreatif sebagai berikut, yaitu: periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik,

kerajinan, desain, model (*fashion*), film, video, fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, dan riset dan pengembangan. Tentu saja pengembangan ekonomi kreatif tidak terbatas pada cakupan industri kreatif tersebut, yang lain masih banyak. Oleh karena itu, setiap SMK agar mengembangkan industri kreatif sesuai dengan karakteristik kejuruan masing-masing.

Untuk menghadapi tuntutan-tuntutan eksternal sebagaimana disebut sebelumnya, sudah saatnya Indonesia mengembangkan SMK Model. Tentu saja pengembangan SMK Model harus berangkat dari kondisi dan kepentingan nasional dalam rangka untuk mempertebal nasionalisme berdasarkan Pancasila dan pilar-pilar persatuan dan kesatuan Indonesia yaitu UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pengembangan SMK Model diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas, berjiwa diri Indonesia, dan berkeunggulan komparatif dan kompetitif secara regional dan internasional melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan SMK Model. Dalam penyelenggaraan SMK Model, upaya peningkatan mutu, relevansi, efektivitas, dan efisiensi harus dilakukan secara optimal dan terus menerus, baik terhadap input, proses, maupun outputnya.

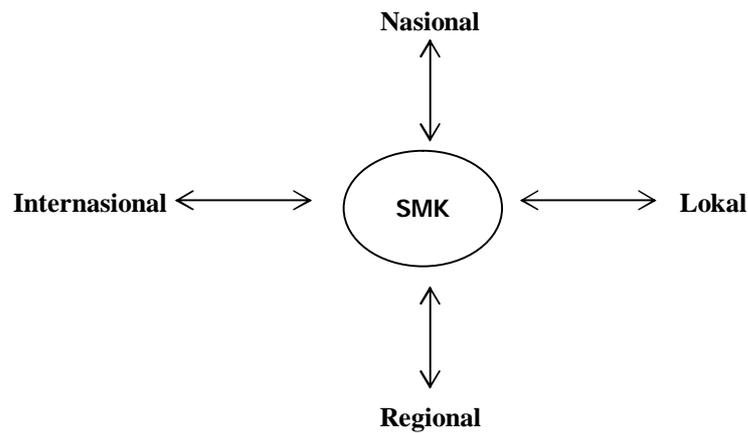
### **SMK MODEL: TEROBOSAN BARU**

SMK Model adalah SMK yang menyelenggarakan dari SMK yang menyelenggarakan fungsi tunggal yaitu menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja pada bidang tertentu menjadi SMK yang menyelenggarakan multi-fungsi (fungsi majemuk) atas dasar prinsip-prinsip kemanfaatan, keterpaduan program, integrasi sumber daya (manusia, uang, peralatan, bahan, dan sebagainya), *resource sharing*, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal. SMK Model dituntut untuk menjadi sekolah cerdas (kreatif, inovatif, inisiatif, cepat, tepat, dan cekatan) dalam mengembangkan program-programnya, dan memiliki keunggulan-keunggulan dibanding

dengan SMK-SMK lain dalam inputnya (kurikulum, guru, fasilitas, dan sebagainya), prosesnya (pembelajaran, manajemen, kepemimpinan, dan sebagainya), dan outputnya (mutu lulusan dan mutu produk-produk lain yang dihasilkan). Satu hal mendasar yang harus dilakukan oleh SMK Model adalah membangun kerjasama, kolaborasi, dan sinergi dengan dunia kerja, mulai dari perumusan kompetensi, penyusunan bahan ajar, pelaksanaan kegiatan, hingga sampai evaluasi dan sertifikasi kompetensi.

Program-program di SMK Model disusun selaras dengan kebutuhan peserta didik dan kemajemukan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja dalam berbagai sektor dan sub-sektornya, baik sektor primer, sekunder, tersier maupun kuartier. Oleh karena itu, keselarasan (*link & match*) antara SMK Model dan dunia kerja merupakan imperatif, baik dalam dimensi kuantitas (jumlah), kualitas (kompetensi), lokasi (tempat), maupun waktu (kapan). SMK Model dapat menyelenggarakan beragam jalur pendidikan, baik formal maupun non-formal, selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, regional, dan internasional. Oleh karena itu, berbagai alternatif jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang selaras dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus disediakan melalui program-program yang berpihak kepada kemajemukan kebutuhan masyarakat. Gambar 3 menunjukkan cakrawala pengembangan SMK Model: lokal, nasional, regional, dan internasional.

Dari Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa SMK Model dituntut untuk mengembangkan program-program berdasarkan keunggulan lokal, berdasarkan karakteristik dan kebutuhan Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam dan melimpah serta kemajemukan sektor-sektor pembangunan, baik sektor primer (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan/kelautan, dsb.), sektor sekunder (industri, perusahaan, dsb.), sektor tersier/jasa langsung (bank, transportasi, dsb.), maupun sektor kuartier/jasa tidak langsung (konsultan, penasehat, dan sebagainya). Siswa SMK harus berjiwa diri Indonesia yang ditempuh melalui pendidikan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.



**Gambar 3: Cakrawala Pengembangan SMK Model**

Mengingat SMK Model tidak bisa steril dari perkembangan global, maka SMK Model harus terbuka terhadap gesekan-gesekan kemajuan-kemajuan global yang konstruktif dengan tetap berjati diri Indonesia. Oleh karenanya, dalam mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan global harus dilakukan secara *eklektif inkorporatif*, dalam arti, tidak semua perkembangan global dipindah ke Indonesia secara utuh tanpa menganalisis konteks asing dan kesesuaiannya dengan konteks Indonesia. Maka benar ajaran Ki Hadjar Dewantawa bahwa Indonesia harus terbuka terhadap pengaruh budaya asing, tetapi harus menggunakan *teori trikon*, yaitu kontinyuitas (berkesinambungan dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia), konsentrisitas (menuju ke arah kebudayaan dunia tetapi tetap menunjukkan kepribadian Indonesia), dan konvergensi (terpadu dengan kebudayaan asing secara selektif yang dipandang tidak berbenturan dan yang dapat memajukan bangsa Indonesia).

Untuk mendukung pembangunan ekonomi masa depan Indonesia, MP3EI menyarankan agar setiap kabupaten/kota dikembangkan sekurang-kurangnya 1 *community college* yang selaras dengan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan. Karena jumlah kabupaten/kota di Indonesia kurang lebih 500, maka sekurang-kurangnya harus dibangun 500 *community colleges* di seluruh tanah air. Kalau pengembangan *community college* saja sekitar 500,

tentu saja pengembangan SMK akan jauh lebih banyak jumlahnya. Jika diasumsikan setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya dikembangkan 2 SMK yang bermutu tinggi dan yang memiliki fungsi majemuk, maka sekurang-kurangnya harus dikembangkan 1000 SMK Model yang tersebar di seluruh tanah air. Untuk mengembangkan SMK Model sejumlah itu jelas akan menggunakan dana yang banyak, dan dengan keterbatasan dana yang tersedia saat ini, sulit mewujudkan mereka sekaligus.

Untuk tahap awal, setiap kota pusat pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam MP3EI dibangun 2 SMK Model sehingga membutuhkan sekurang-kurangnya 74 SMK Model. Saat ini Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2012) baru mengembangkan 12 SMK Model, yaitu SMKN 2 Pacitan, SMKN 2 Palembang, SMKN 2 Kraksaan, SMKN 4 Palangka Raya, SMKN 1 Sukowati, SMKN 2 Sukowati, SMKN 2 Kupang, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Kuningan, SMKN 13 Bandung, SMKN 9 Bandung, dan SMKN 5 Surakarta. Saat ini baru dirintis 12 SMK Model, yaitu SMKN 2 Pacitan, SMKN 2 Palembang, SMKN 2 Kraksaan, SMKN 4 Palangka Raya, SMKN 1 Sukowati, SMKN 2 Sukowati, SMKN 2 Kupang, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Kuningan, SMKN 13 Bandung, SMKN 9 Bandung, dan SMKN 5 Surakarta. Rintisan 12 SMK Model tersebut belum mengembangkan program-program yang multi fungsi. Berikut ditawarkan

ide-ide pengembangan SMK Model yang diharapkan mampu menyelenggarakan 13 fungsi majemuk SMK Model.

### FUNGSI MAJEMUK SMK MODEL

Agar pendidikan kejuruan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, King & Palmer (2010) berpendapat bahwa abad 21 memerlukan reformasi fungsi pendidikan kejuruan. Untuk Indonesia, pendapat mereka bukanlah hal baru karena pada tahun 1998 Direktorat Pembinaan SMK telah melakukan reformasi dengan konsepnya yang disebut *Skills Toward 2020* yang intinya bahwa SMK harus berbasis *demand driven* (berbasis kebutuhan dunia kerja dengan segala variasi jenis-jenisnya). *Skills Toward 2020* juga sangat selaras dengan saran UNESCO (1984) bahwa pendidikan kejuruan agar menata ulang organisasi dan koordinasinya dengan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan SMK Model agar menekankan keselarasannya dengan kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya, pengembangan SMK Model agar mencakup 13 fungsi majemuk sebagai berikut.

**Pertama**, SMK Model dapat berfungsi mengembangkan program-program unggulan mutu lulusannya yang dapat dirujuk oleh SMK-SMK lain di Indonesia. Program-program unggulan yang dimaksud, dalam bahasa ekonomi, adalah *what to produce, how to produce, and for whom* yang selaras dengan aneka ragam kebutuhan pembangunan ekonomi dan kebutuhan masyarakat melalui enam kelompok kejuruan, yaitu: (1) teknologi dan rekayasa; (2) teknologi informasi dan komunikasi; (3) kesehatan; (4) seni, kerajinan, dan pariwisata; (5) agrobisnis dan teknologi; dan (6) bisnis dan manajemen. Untuk menghasilkan mutu lulusan yang unggul, SMK Model harus menunjukkan kehebatan-kehebatan dalam manajemen sekolah yang dibuktikan oleh 8P yaitu: (1) perencanaan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja; (2) pengorganisasian yang mengacu fungsi; (3) pelaksanaan yang efektif dan efisien; (4) pengkoordinasian yang solid; (5) pemantauan dan pengevaluasian yang tepat; (6) pengembangan sekolah yang futuristik; (7) pemasaran yang mampu menarik masyarakat untuk belajar ke SMK dan

yang mampu meyakinkan dunia kerja untuk merekrut lulusannya; dan (8) penempatan sekolahnya dalam posisi unggul dibanding SMK-SMK lainnya (*school positioning*). Oleh karena itu, kisah-kisah sukses yang dialami oleh SMK Model harus dibukukan dan disebarluaskan ke SMK-SMK lain di Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari tugas dan fungsinya sebagai SMK Model.

**Kedua**, SMK Model dapat mendirikan unit usaha di sekolahnya yang produknya bisa berupa barang dan/atau jasa dan siswanya bekerja di unit usaha ini sebagai karyawan atas bimbingan gurunya. Unit usaha ini dapat berbentuk badan usaha atau koperasi. SMK semacam ini berfungsi sebagai pusat pengembangan unit produksi/*teaching factory/industrial based education model*. Untuk menjadi *teaching factory*, SMK harus mampu menyelenggarakan usaha bisnis/perusahaan dan dituntut menjalankan fungsi-fungsi baku perusahaan, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen peralatan dan perbekalan, prinsip-prinsip akuntansi, dan inti manajemen (*general manager*). SMK semacam ini harus menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berbasis dunia kerja (*experiential education/work based learning/hand-on experience*) utamanya adalah *production based learning* (belajar membuat barang jadi yang *marketable*) yaitu belajar melalui kerja yang sungguhan seperti yang terjadi di dunia kerja bisnis dan bukan belajar yang sifatnya tiruan (artifisial).

**Ketiga**, SMK dapat berfungsi sebagai *teaching industry* yaitu SMK bekerja sama dengan industri dengan menyediakan tempat bagi industri untuk memproduksi barang sesuai dengan yang diproduksi oleh industri bersangkutan. Guru dan siswa SMK membuat produk atas bimbingan karyawan industri. Dengan cara ini SMK dapat memperoleh *transfer of knowledge* dan lisensi dari industri untuk memproduksi barang dan memasarkannya secara terbatas. SMK-SMK yang telah menjalankan *teaching industry* misalnya SMK-Kanzen, SMK-Zyrex, dan SMK-Advan.

**Keempat,** SMK Model dapat berfungsi sebagai mitra perusahaan dalam pelatihan kerja karyawan perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia selalu mengalokasikan dana untuk meningkatkan dan memutakhirkan keterampilan karyawannya agar lebih produktif. Jika SMK Model mampu menawarkan program-program pelatihan kerja yang selaras dengan kebutuhan perusahaan, maka banyak perusahaan yang ingin menjadi mitra SMK Model. Untuk itu, SMK Model harus benar-benar memiliki program-program yang berhimpitan/sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, kemitraan/hubungan dan kedekatan dengan perusahaan merupakan keniscayaan bagi SMK Model.

**Kelima,** SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan kerja bagi siapa saja yang membutuhkannya dan yang dapat untung darinya, terutama para penganggur/pencari kerja atau mereka yang ingin meningkatkan keterampilannya. Untuk itu, SMK Model harus memiliki program-program keterampilan jangka pendek (*short training*) yang bervariasi/beragam sesuai dengan kebutuhan para penganggur atau siapa saja yang membutuhkannya dalam rangka meningkatkan keterampilan kejuruannya.

**Keenam,** SMK Model dapat berfungsi sebagai *community college* yang menyelenggarakan kursus-kursus pendek keterampilan kejuruan/vokasi dan menyelenggarakan Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3 sebagai transit untuk melanjutkan ke universitas (berfungsi sebagai *transfer education, career education, and continuing education*). Mengingat *community college* merupakan kewenangan perguruan tinggi, maka penyelenggaraan *community college* harus dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi lokal terutama dengan program diploma dan politeknik atau polibisnis (*sharing*). SMK Model menyediakan sumber daya manusia (pendidik) dan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, sedang perguruan tinggi menyediakan program-programnya (kurikulumnya) dan pengeluaran ijasahnya. Mengingat sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya adalah milik SMK Model, maka perhitungan biaya kerja sama

antara SMK Model dan perguruan tinggi harus disepakati, yaitu siapa membiayai berapa banyak dan untuk apa.

**Ketujuh,** SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan kewirausahaan (pusat pelatihan wirausahawan/pengusaha) bagi siapa saja yang ingin memulai/belajar ulang/mengembangkan usahanya, baik usaha mikro, kecil maupun menengah. Sebagai *entrepreneurship center*, SMK Model harus menguasai cara-cara berusaha yang berbasis ilmu ekonomi yaitu *what to produce, how to produce, and for whom*. SMK Model harus mampu mengajarkan manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen peralatan dan perbekalan, manajemen keuangan, akuntansi, dan inti manajemen. Lebih rincinya, SMK harus menyelenggarakan pelatihan wirausahawan yang mencakup dua belas fungsi baku perusahaan, yaitu: produksi, perencanaan produksi, riset dan pengembangan produksi, transaksi, perebutan pelanggan, perencanaan pemasaran, riset pasar dan pemasaran, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen peralatan dan perlengkapan serta perbekalan, manajemen akuntansi, dan inti manajemen.

**Kedelapan,** SMK Model dapat berfungsi sebagai tempat pelatihan praktik bagi SMK-SMK lain, baik untuk guru-gurunya maupun siswa-siswanya. Dulu pernah ada Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) yang berfungsi semacam ini, tetapi pudar karena pengelolaan yang tidak efektif dan inefisien. Model seperti BLPT ini dapat difungsikan lagi melalui SMK Model karena model BLPT ini sangat efisien dengan diterapkannya *resource sharing* dan penggunaan fasilitas secara maksimal.

**Kesembilan,** SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat produksi (*production center*) khususnya produk-produk yang berbasis keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain dan bahkan negara-negara lain. Produk-produk unggulan lokal dapat dipasarkan ke daerah-daerah lain dan bahkan ke manca negara karena produk-produk ini memiliki daya saing komparatif tinggi karena keunikan dan keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh

daerah-daerah lain dan negara-negara lain. Tantangan utama yang dihadapi oleh SMK Model sebagai *production center* adalah pemasaran karena sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak diperbolehkan menjual produk-produknya ke publik, layaknya seperti perusahaan. Jalan keluar yang rasional adalah dengan menjadikan SMK Model sebagai Badan Layanan Umum (BLU) atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di sekitarnya dalam kepemilikan lisensi terbatas untuk memproduksi dan memasarkan barang/jasa dari hasil kerja sama.

**Kesepuluh**, mengingat ketersediaan kemampuan sumber daya manusia (guru) dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh SMK Model, maka SMK Model dapat berfungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagai kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004. Tentu saja pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan uji kompetensi didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, SMK Model harus bekerja sama dengan BNSP.

**Kesebelas**, SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat informasi pasar kerja/bursa kerja khusus (BKK) yang diupayakan melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Jika fungsi ini dijalankan dengan baik, maka transisi dari SMK Model ke dunia kerja akan lancar sehingga mampu mengurangi masa tunggu kerja atau mengurangi lama pengangguran. Untuk itu, bersama-sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, SMK Model agar membangun sistem informasi pasar kerja yang mutakhir dan akurat. Agar fungsi BKK benar-benar dapat memperlancar transisi peserta didik SMK ke dunia kerja, maka guru bimbingan dan konseling kejuruan dituntut untuk mencari informasi lowongan pekerjaan yang meliputi jenis pekerjaan dan persyaratan untuk melamarnya dan ini harus diinformasikan ke siswa-siswa SMK yang hampir lulus atau bahkan diajarkan sejak dini

agar siswa-siswa menyiapkan dirinya sejak dini untuk memasuki dunia kerja.

**Kedua belas**, SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan bahan pelatihan. Bahan-bahan pelatihan kerja berbasis kompetensi sangat dibutuhkan oleh SMK-SMK dan pusat-pusat pelatihan kerja, namun sampai saat ini keberadaannya masih langka kecuali pada perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan. Pusat-pusat pengembangan bahan pelatihan kerja dapat didirikan di SMK Model karena ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitasnya.

**Ketigabelas**, mengingat ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitasnya, SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat penyiapan calon-calon tenaga kerja internasional (TKI) agar terampil, luwes, melek teknologi, mampu berbahasa asing, dan mampu bergaul dengan keragaman budaya lintas bangsa. Untuk itu, SMK Model dituntut untuk memiliki wawasan global, terutama wawasan tentang tenaga kerja yang dibutuhkan oleh negara-negara lain serta persyaratan-persyaratan untuk memasukinya.

## PENUTUP

SMK Model dirancang untuk menyelenggarakan fungsi majemuk berdasarkan kemajemukan kebutuhan masyarakat, khususnya dunia kerja. Oleh karena itu, keselarasannya dengan kebutuhan masyarakat merupakan imperatif, baik dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, maupun waktu. Transisi menuju SMK Model memerlukan penataan ulang kebijakan, perencanaan, penganggaran, kelembagaan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan SMK Model.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua, sekretaris, dan anggota redaksi yang telah menyetujui artikel ini untuk dimuat dalam Jurnal Ilmiah *Cakrawala Pendidikan*. Semoga amal beliau dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Amin.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim.2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Anonim.2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33)*.
- Departemen Pendidikan Nasional.2008. *Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. 1994. *Keputusan Bersama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor 0217/U/1994 & 044/SKEP/KU/VIII/94 tentang Pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional*. Jakarta: Depdikbud dan Kadin.
- Direktorat Pembinaan SMK.2012. *Panduan Pelaksanaan Tahun 2012: Bantuan Pembangunan SMK Model/Rujukan (10 SMK)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2012. *Panduan Pelaksanaan Tahun 2012: Bantuan Pembangunan SMK Model/Rujukan-Lanjutan (2 SMK)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2012. *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2010. *Master Plan Link and Match Pendidikan, Pelatihan, dan Dunia Kerja*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Kementerian Sekretariat Negara.2009. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1994. *Buku 1: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- King, Kenneth & Robert Palmer. 2010. *Planning for Technical and Vocational Skills Development*. Paris: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
- Trilling, Bernie & Charles Fadel.2010. *21<sup>st</sup> Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc.
- United Nations.2008. *Creative Economy Report 2008*. New York: United Nations.
- UNESCO.1984. *Policy, Planning, and Management in Technical and Vocational Education*. Paris: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
- UNESCO.1992. *New Directions in Technical and Vocational Education*. Bangkok: UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific.